

FENOMENA URBANISASI DAN KEBIJAKAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI PERKOTAAN INDONESIA

Mita Noveria

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ABSTRACT

Indonesia has been experiencing urbanization since the last decades. The level and the pace of urbanisation differ among provinces and cities, those which are located in Java are more urbanised compared to those in the outer islands. Various factors contribute to the fast growth of urban population. Similar with other less developed countries in general, the high rate of population migration from rural to urban areas are the most dominant factors inducing rapid urban population growth. Since economic activities and development programs in general are more concentrated in urban areas, migration of rural dwellers to urban areas is inevitable. Rural inhabitants move to the cities in order to gain access to economic activities. However, urbanisation creates problems for urban governments, especially those responsible in meeting the needs of the populace. Growing needs of housing and its supporting facilities and infrastructures are a crucial problem for the rapidly growing urban population. In fact urban governments, in collaboration with other parties, have carried out various efforts to provide housing, including for the poor and the migrants who mainly gain low and uncertain income. However the last group seems to be excluded from the benefits. Due to the limited amount of money they have, the majority of the poor and the rural to urban migrants cannot afford for reciding houses provided by the government. This forces them to reside in slums and squatter settlements that lack of various housing facilities and infrastructures. Therefore, urban governments have to conduct other attempts to provide affordable shelters for the poor.

Keywords: urbanisasi; migrasi desa – kota; perumahan dan permukiman

PENDAHULUAN

Fenomena urbanisasi telah menjadi perhatian para perencana dan pembuat kebijakan selama beberapa dekade terakhir. Dari sisi kependudukan, urbanisasi didefinisikan sebagai peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan (Wilson 1985: 225). Istilah urbanisasi sering pula diartikan sebagai tingkat konsentrasi penduduk perkotaan dilihat dari persentase penduduk di wilayah tersebut terhadap jumlah penduduk suatu daerah, misalnya provinsi atau negara. Urbanisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertumbuhan alami (selisih antara kelahiran dan kematian) penduduk perkotaan, migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan, serta perubahan klasifikasi daerah perkotaan.

Data BPS memperlihatkan bahwa penduduk perkotaan Indonesia tumbuh dengan cepat. Hasil Sensus Penduduk tahun 1980 memperlihatkan bahwa penduduk perkotaan berjumlah 32,8 juta orang (22,3 persen dari jumlah seluruh penduduk). Pada tahun 1990, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 55,4 juta penduduk (30,9 persen dari total seluruh populasi) dan pada tahun 2000 menjadi 85,4 juta orang, yang mencakup 42,4 persen dari jumlah seluruh penduduk (BPS 1982; BPS 1992; BPS 2002). Berdasar data hasil Sensus Penduduk tahun 2000, BPS memproyeksikan bahwa pada tahun 2010 lebih dari separuh penduduk Indonesia (54,2 persen) tinggal di perkotaan. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah tersebut diproyeksikan akan mencapai 68,3 persen (BPS, Bappenas, dan UNFPA 2005).

Tingkat urbanisasi di Indonesia tampak lebih kecil apabila dibandingkan dengan di negara-negara industri (baca: negara-negara maju). Pada umumnya tingkat urbanisasi di negara-negara industri pada saat ini berada di atas 75 persen. Di benua Eropa, umpamanya, tingkat urbanisasi telah mencapai 76 persen (Kotter 2004). Namun, proporsi penduduk perkotaan di Indonesia sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang pada umumnya, yaitu berkisar antara 35 – 40 persen.

Seluruh penduduk perkotaan Indonesia tersebar di berbagai klasifikasi kota. Pada tahun 1990, umpamanya, sebanyak 40 persen dari mereka tinggal di kota metropolitan (kota berpenduduk lebih dari 1.000.000 orang) dan kota besar (berpenduduk 500.000 – 1.000.000 orang).

Selanjutnya, sekitar 20 persen tinggal di kota menengah (berpenduduk 100.000 – 500.000 orang), sementara sisanya, 40 persen, bertempat tinggal di kota kecil (Tjiptoherijanto 1996). Pada tahun yang sama, sekitar 56 persen penduduk dunia tinggal di kota-kota yang berpenduduk kurang dari 500.000 orang (UNFPA 2007a). Berdasar data tersebut dapat diketahui bahwa penduduk perkotaan Indonesia mempunyai kecenderungan yang mirip dengan penduduk dunia secara umum.

Tingginya pertumbuhan penduduk kota, tidak terhindarkan lagi akan menyebabkan makin berkembangnya kota-kota menjadi lebih besar. Perkembangan kota ini menjadi fokus perhatian internasional, baik dari sisi kebijakan maupun ilmu pengetahuan, karena dampaknya yang serius terhadap lingkungan global seperti konsumsi lahan yang besar, polusi udara, kelangkaan air bersih, kemiskinan, segregasi sosial, dan kerentanan (Kotter 2004). Pertumbuhan penduduk kota juga memunculkan permasalahan tersendiri bagi daerah tersebut. Salah satu di antaranya adalah pengadaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, seperti perumahan, air bersih, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Fasilitas-fasilitas sosial lainnya untuk kegiatan kemasyarakatan, seperti ruang terbuka tempat berkumpul penduduk dan sarana olah raga juga harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Sampai saat ini, salah satu fokus perhatian yang terkait dengan tingginya pertumbuhan penduduk perkotaan adalah seputar upaya penyediaan tempat tinggal dan perbaikan kondisi kehidupan penduduk (UNFPA 2007a).

Pemenuhan semua kebutuhan di atas merupakan beban yang harus dipenuhi, tidak hanya oleh pemerintah kota tetapi juga pihak swasta yang berkecimpung di bidang pengadaan sarana dan prasarana dasar kota. Penyediaan perumahan, umpamanya, hingga saat ini belum dapat mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat. Bahkan kecepatan penyediaan perumahan cenderung tertinggal dari kecepatan pertumbuhan penduduk kota yang membutuhkannya (Yudohusodo dan Salam 1991). Masalah yang timbul akibat pertumbuhan penduduk yang pesat akan lebih dirasakan oleh kota-kota kecil yang berpenduduk kurang dari 100.000 orang. Hal ini karena pada umumnya penyediaan kebutuhan perumahan, air bersih dengan sistem perpipaan, pembuangan sampah, dan berbagai layanan pendukung lainnya di kota-kota dengan

klasifikasi tersebut masih sangat kurang (UNFPA 2007a).

Tulisan ini membahas isu perumahan dan permukiman yang terkait dengan fenomena urbanisasi, khususnya yang disebabkan oleh perpindahan penduduk dari desa ke kota. Untuk memberikan gambaran mengenai fenomena urbanisasi di berbagai wilayah di Indonesia, tulisan ini diawali dengan peta penduduk perkotaan di seluruh provinsi dan kecenderungannya, terutama dalam dua dasawarsa terakhir. Di samping, juga akan disajikan peta penduduk di beberapa negara di Asia, khususnya Asia Tenggara. Selanjutnya, tulisan ini juga membahas isu-isu yang berkaitan dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang merupakan salah satu penyebab tingginya proporsi penduduk perkotaan. Pembahasan mencakup pola, kecenderungan, dan faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya aktifitas tersebut.

Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian penulis bersama tim di kota Surabaya mengenai mobilitas penduduk dari desa ke kota berkaitan dengan terciptanya permukiman kumuh di kota tersebut. Selanjutnya, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti publikasi BPS (Badan Pusat Statistik), buku-buku dan artikel-artikel yang terkait dengan isu urbanisasi dalam kaitannya dengan perumahan dan permukiman.

TREN URBANISASI DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA DI ASIA TENGGARA DAN ASIA TIMUR

Secara umum, peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Namun, proporsi serta pertumbuhannya berbeda-beda antarprovinsi. Di antara seluruh provinsi di Indonesia, DKI Jakarta merupakan wilayah dengan persentase penduduk kota terbesar. Pada tahun 1990, umpamanya, sebanyak 99,6 persen penduduk DKI Jakarta tinggal di wilayah yang tergolong sebagai perkotaan, sementara di provinsi-provinsi yang lain proporsinya kurang dari 50 persen. Selanjutnya, pada tahun 2000 dan 2010, semua penduduk DKI Jakarta tinggal di perkotaan (BPS, Bappenas, dan UNFPA 2005). Kenyataan ini tidak mengherankan mengingat semua wilayah DKI Jakarta termasuk dalam klasifikasi kota.

Proporsi penduduk kota di provinsi-provinsi lain terus mengalami peningkatan. Sebagai contoh, pada tahun 1995, persentase penduduk kota di dua provinsi, yaitu DIY dan Kalimantan Timur sudah mencapai 50 persen. Peningkatan persentase penduduk kota yang pesat di kedua provinsi ini dapat dipahami dengan alasan-alasan berikut. Kota Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pelajar (karena mempunyai banyak lembaga pendidikan dan dengan biaya hidup yang relatif murah) menjadi daya tarik bagi pelajar dan mahasiswa dari berbagai provinsi, sehingga persentase penduduk kota meningkat dengan cepat akibat banyaknya pelajar dan mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di kota tersebut. Selanjutnya, peningkatan pembangunan di wilayah provinsi Kalimantan Timur juga menjadi daya tarik bagi penduduk dari berbagai wilayah di Indonesia untuk memanfaatkan peluang ekonomi akibat proses pembangunan yang berlangsung. Pada tahun 2005, terdapat enam provinsi yang mempunyai tingkat urbanisasi lebih dari 50 persen, yaitu DKI Jakarta, DIY, Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat, dan Bali dengan urutan tertinggi sampai terendah secara berturut-turut. Sebaliknya, NTT merupakan provinsi dengan persentase penduduk kota terendah di antara seluruh provinsi di Indonesia, meskipun juga mengalami peningkatan persentase kelompok penduduk tersebut dalam kurun waktu 1990 – 2005.

Pertumbuhan penduduk kota di masing-masing provinsi sangat bervariasi. Secara nasional, angka pertumbuhan penduduk perkotaan selama periode 1980 – 1990 sebesar 5,37 persen per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk perdesaan (0,83 persen per tahun) dan penduduk Indonesia secara keseluruhan (1,99 persen per tahun). Dalam periode 10 tahun berikutnya (1990 – 2000) angka pertumbuhan penduduk perkotaan menurun menjadi 4,41 persen per tahun, namun masih lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk perdesaan dan Indonesia secara umum, yaitu (-) 0,66 persen dan 1,16 persen per tahun secara berturut-turut (dihitung dari hasil Sensus Penduduk tahun 1980, 1990, dan 2000). Selama 2000 – 2005 angka pertumbuhan penduduk kota adalah 1,51 persen per tahun, penduduk perdesaan 0,93 persen, dan penduduk Indonesia sebesar 1,17 persen per tahun (dihitung dari hasil Sensus Penduduk 2000 dan SUPAS 2005). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa migrasi penduduk (dari desa ke kota) merupakan faktor dominan yang menyebabkan

tingginya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, khususnya kota menengah dan sedang, di Indonesia. Hal ini berdasar pada asumsi bahwa jika laju pertumbuhan penduduk suatu kota di atas 2,5 persen per tahun, maka faktor perpindahan (net migrasi positif) lebih berpengaruh daripada pertumbuhan penduduk alami (Mamas 2000).

Beberapa kota mengalami pertumbuhan penduduk yang lebih rendah daripada pertumbuhan penduduk Indonesia secara keseluruhan, namun sebagian lainnya masih memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Selama tahun 2000 – 2005 dua kota besar (berpenduduk di atas 1.000.000 jiwa) di Provinsi Jawa Barat (Depok dan Bekasi) mempunyai pertumbuhan penduduk di atas 3,5 persen per tahun (Romdiati 2008). Tingginya pertumbuhan penduduk di kota Depok dan Bekasi kemungkinan besar akibat migrasi masuk, terutama ke berbagai permukiman yang berkembang pesat di kedua daerah tersebut. Di kota Depok, khususnya, keberadaan Universitas Indonesia kemungkinan juga berperan dalam menyebabkan tingginya pertumbuhan penduduk kota tersebut. Banyak mahasiswa yang berasal dari luar kota yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tersebut tinggal di permukiman di sekitar kampus. Tiga kota menengah/sedang, yaitu kota yang berpenduduk antara 500.000 – 1.000.000 jiwa, yang pertumbuhan penduduknya di atas 3,5 persen per tahun adalah Bogor, Pekanbaru, dan Batam. Pertumbuhan penduduk Kota Batam bahkan di atas 7 persen per tahun. Banyaknya industri di kota yang perbatasan dengan negara Singapura ini menjadi daya tarik bagi pencari kerja dari berbagai wilayah di Indonesia, baik yang berasal dari wilayah perdesaan maupun yang dari perkotaan, untuk bermigrasi ke kota Batam.

Peningkatan proporsi penduduk perkotaan bukan hanya fenomena yang terjadi di Indonesia. Di berbagai negara, termasuk negara berkembang juga terjadi peningkatan proporsi penduduk kota, walaupun masih lebih rendah daripada negara-negara maju. Tabel 1 memperlihatkan kecenderungan penduduk perkotaan di Asia Tenggara dan Asia Timur selama empat dekade sejak tahun 1960. Di antara seluruh negara di Asia Tenggara (tidak termasuk Singapura), pada tahun 1960, 1970, dan 1980, Filipina merupakan negara dengan persentase penduduk kota tertinggi, kemudian diikuti oleh Malaysia. Kecenderungan peningkatan penduduk tersebut terus berlangsung pada tahun 2000. Namun, pada tahun 2007 proporsi penduduk perkotaan tertinggi ditemui di Malaysia.

Selanjutnya, di wilayah Asia Timur, persentase penduduk kota tertinggi ditemui di Jepang, yaitu pada tahun 1960, 1970, dan 1980. Namun, pada tahun 2000 dan 2007, posisi ini diduduki oleh Korea Selatan yang mengalami peningkatan penduduk kota lebih pesat daripada Jepang.

Tabel 1
Persentase Penduduk Perkotaan di Asia Tenggara dan Asia Timur, 1960 – 2007

	1960	1970	1980	2000*	2007**
Indonesia	14,6	17,1	22,2	36,5	50,0
Thailand	16,2	20,8	24,5	40,0	33,0
Filipina	30,3	33,0	37,4	49,0	64,0
Malaysia	25,2	28,7	37,4	tidak ada data	69,0
Myanmar	19,3	22,8	23,9	28,2	32,0
Kamboja	10,3	11,7	10,3	14,5	21,0
Vietnam	14,7	18,3	19,3	27,1	27,0
Laos	7,9	9,6	13,4	25,1	21,0
Papua Nugini	2,7	9,8	13,1	20,2	tidak ada data
Asia Tenggara	17,6	20,2	24,0	35,5	45,0
China	16,8	19,3	20,4	25,1	42,0
Jepang	62,5	71,2	76,2	77,7	66,0
Korea Selatan	27,7	40,7	56,9	80,5	81,0
Korea Utara	40,2	50,1	59,7	72,9	62,0
Asia Timur	25,0	26,9	28,1	32,6	46,0
Penduduk dunia	33,6	37,2	39,9	48,2	50,0

Sumber: Brookfield & Byron 1993.
Catatan : * angka proyeksi
** data pada tahun 2007 diambil dari UNFPA (2007a: 90 – 91), tidak termasuk dalam Brookfield & Byron 1993

Seperti halnya di Indonesia, laju pertumbuhan penduduk perkotaan di berbagai negara di Asia Tenggara juga berbeda-beda (lihat tabel 2). Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat pertumbuhan penduduk kota di semua negara di kawasan Asia Tenggara adalah di atas 2,5 persen per tahun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan penduduk perkotaan di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara adalah migrasi penduduk dari desa ke kota. Di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Laos dan Papua Nugini merupakan dua negara yang mengalami pertumbuhan penduduk kota terbesar. Apabila tidak disertai dengan penyediaan semua sarana dan prasarana perkotaan, maka kedua negara tersebut kemungkinan besar akan menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkotaan yang lebih berat dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Faktor-faktor penyebab peningkatan jumlah penduduk perkotaan dapat

Tabel 2
Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Perkotaan di Asia Tenggara per Tahun (%)

<i>Kota</i>	<i>1960 – 1965</i>	<i>1970 – 1975</i>	<i>1980 – 1985</i>	<i>1990 – 1995*</i>	<i>2000 – 2005*</i>	<i>2005 – 2010**</i>
Indonesia	3,72	4,92	4,60	3,96	3,24	3,3
Thailand	3,53	5,59	4,66	4,02	3,70	1,8
Filipina	3,85	4,02	3,81	3,71	3,32	2,8
Malaysia	3,77	4,87	4,51	3,87	2,77	2,9
Myanmar	3,83	3,23	2,09	3,21	3,84	2,9
Kamboja	3,48	-2,09	3,54	4,19	4,30	4,9
Vietnam	4,18	2,86	3,27	4,16	4,38	3,0
Laos	3,14	5,52	5,58	5,45	4,77	4,0
Papua Nugini	5,44	6,08	4,35	4,88	5,05	tidak ada data
Asia Tenggara	3,77	4,14	3,96	3,83	3,44	2,2
Penduduk dunia	2,97	2,65	2,42	2,55	2,52	2,0

Sumber: Brookfield & Byron 1993.
 Catatan : * angka proyeksi
 ** data pada tahun 2005 – 2010 diambil dari UNFPA (2007a: 90 – 91), tidak termasuk dalam Brookfield & Byron 1993.

diidentifikasi melalui tingkat pertumbuhannya. Jika laju pertumbuhan penduduk kota kurang dari 2,5 persen per tahun, maka peningkatan jumlah penduduk kota disebabkan oleh pertumbuhan alami (selisih kelahiran dan kematian). Namun, jika laju pertumbuhannya di atas 2,5 persen, maka faktor migrasi masuk lebih berperan dalam peningkatan jumlah penduduk kota. Di tingkat dunia secara keseluruhan, sepanjang kurun waktu 2005 – 2010, faktor dominan yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk kota adalah pertumbuhan penduduk alami. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan penduduk kota dunia, yaitu sebesar 2 persen per tahun. Kecenderungan yang sama juga ditemui di negara-negara maju (*more developed regions*) yang mempunyai laju pertumbuhan penduduk perkotaan sebesar 0,5 persen setiap tahun. Sebaliknya, di negara-negara berkembang (*less developed regions*) dan negara-negara paling kurang berkembang (*least developed regions*), penyebab utama peningkatan penduduk perkotaan adalah migrasi masuk ke wilayah perkotaan, termasuk perpindahan dari desa ke kota. Laju pertumbuhan penduduk perkotaan di negara-negara berkembang secara keseluruhan adalah 2,5 persen, sementara di negara-negara paling kurang berkembang sebesar 4 persen per tahun (UNFPA 2007a).

MIGRASI DESA – KOTA: PENYUMBANG TERBESAR PERTUMBUHAN PENDUDUK DI BEBERAPA KOTA DI INDONESIA

Perpindahan penduduk dari perdesaan menuju daerah perkotaan merupakan salah satu penyebab pesatnya pertumbuhan penduduk kota, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Namun, di beberapa kota ditemukan pula migran masuk yang juga berasal dari daerah perkotaan yang lain. Di kota Jakarta, misalnya, selama periode 1990-1995, sebanyak 61,7 persen migran masuk berasal dari perkotaan di luar Jakarta, sedangkan yang berasal dari daerah perdesaan sebanyak 35,9 persen (Mamas 2000). Selanjutnya, sebanyak 70,9 persen, 62,4 persen, dan 53,5 migran di Medan, Bandung, dan Surabaya juga berasal dari wilayah perkotaan di luar kota-kota tersebut. Ada kemungkinan migran yang tinggal di Jakarta, Medan, Bandung, dan Surabaya berasal dari kota-kota yang lebih kecil yang berlokasi di sekitarnya. Selain di keempat kota tersebut, perpindahan penduduk dari desa ke kota masih menjadi penyebab dominan pertumbuhan penduduk kota-kota di Indonesia.

Mengapa Penduduk Desa Pindah ke Kota?

Pada umumnya, faktor ekonomi memegang peranan penting dalam terjadinya mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk dilakukan dengan pertimbangan rasional untuk meningkatkan kondisi ekonomi, didasari oleh faktor pendorong di daerah asal dan faktor penarik di daerah tujuan mobilitas. Perbedaan pendapatan di wilayah perdesaan dan perkotaan pada umumnya, merupakan faktor dominan yang menyebabkan penduduk desa melakukan mobilitas ke perkotaan (Gilbert & Giggler 1996; http://www.globalchange.umich.edu/globalchange2/current/lectures/urban_gc/). Beberapa penelitian, seperti dikutip Hendrizal (2004) menemukan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan migran di perkotaan –walau pekerjaan kasar dan dianggap rendah sekali pun– tetap dapat memberikan penghasilan yang lebih baik dibandingkan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan-pekerjaan di desa. Pemulung dan penyemir sepatu, contohnya, bisa mendapatkan penghasilan dua sampai tiga kali lebih besar daripada penghasilan mereka sebagai buruh tani di desa. Hal ini terutama dirasakan oleh petani yang tidak memiliki tanah atau memiliki tanah yang berukuran sempit. Seorang responden pengumpul barang-barang bekas yang diwawancarai dalam penelitian tentang mobilitas penduduk dan permukiman kumuh di kota Surabaya memperkuat asumsi tersebut (lihat di bawah) katanya,

“... kalau saya tetap tinggal di desa dapat apa. Tanah *ndak* punya, mau kerja buruh tani bayarannya *ndak* seberapa, *ndak* bisa buat *nyekolahkan* anak. Lebih baik ya pergi ke kota, ke Surabaya, *ngumpul*in barang-barang bekas, nanti dijual dapat uang. Kan bisa buat hidup dan bayar sekolah anak-anak di kampung”.

Kesempatan kerja, terutama di sektor informal, yang terbuka luas di perkotaan menjadi penyebab arus migrasi dari desa ke kota, sejalan dengan asumsi yang menyatakan bahwa “orang akan mengikuti pekerjaan”. Pekerjaan sebagai pedagang makanan kaki lima dan pedagang keliling, misalnya, menjadi daya tarik bagi penduduk desa untuk pindah ke kota-kota yang dekat dengan daerah asal. Kerukunan yang terjalin kuat di antara sesama pedagang, apalagi mereka berasal dari daerah yang sama, memudahkan penduduk desa yang pindah ke perkotaan dengan tujuan untuk berdagang makanan. Hasil FGD dengan beberapa pedagang makanan keliling pada penelitian tentang mobilitas penduduk dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh tim peneliti Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI pada tahun 2004 di kota Surabaya memperlihatkan keadaan tersebut, seperti kutipan berikut ini.

“Kalau di sini sistem tetangga baik semua. *Nggak* bisa masak ya diajari, *nggak* bisa *bikin* lontong diajari, *nggak* bisa buat petis ya dikasih, dipelajari, di sini bukan keluarga, tapi lebih dari keluarga. ...” (Romdiati, dkk. 2007: 86)

“Pokoknya di sini itu lengkap, semua punya. Palu punya, *graji* (maksudnya: gergaji) punya, komplit, yang membuat di sini juga. Pokoknya di sini kerja sama-sama membuat *rombong* (gerobak dorong untuk menjual makanan), uang Rp 20.000,- jadi *rombong*, ada yang beli seng, ada yang beli paku, ada yang beli cat, dua hari tiga hari jadi. Kalau ada yang kerja, yang lain ya bantu-bantu (Romdiati, dkk. 2007: 86)

Tujuan migrasi untuk mencari pekerjaan di kota tidak hanya ditemui pada mereka yang sudah menikah, terjadi juga di kalangan penduduk usia muda, misalnya dalam kelompok umur 15 – 24 tahun. Anak-anak muda perdesaan melakukan migrasi ke daerah perkotaan dengan

harapan dapat keluar dari jerat kemiskinan yang memerangkap orang tua mereka (UNFPA 2007b). Banyaknya pilihan pekerjaan yang tersedia di wilayah perkotaan memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan dengan upah yang (jauh) lebih besar dibanding upah kerja di desa. Analisis data hasil Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995 memperlihatkan bahwa proporsi terbesar penduduk usia muda (15 – 24 tahun), yaitu sebesar 25, 39 persen, melakukan migrasi ke perkotaan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan (Raharto dan Noveria 2005). Meskipun terdapat sedikit penurunan pada hasil Sensus Penduduk 2000, yaitu menjadi 23,31 persen, mencari kerja dan melanjutkan pendidikan (23, 75 persen) tetap mendominasi alasan perpindahan penduduk dalam kelompok usia muda dari desa ke kota.

Kebijaksanaan pembangunan yang "*urban bias*" menjadi salah satu penyebab besarnya arus migrasi ke daerah perkotaan. Pembangunan ekonomi yang antara lain diwujudkan dengan pembangunan pusat-pusat ekonomi selama ini lebih banyak dilakukan di perkotaan. Konsentrasi penduduk yang tinggi di daerah perkotaan menyebabkan adanya pemusatan aktifitas perekonomian di daerah tersebut (Tjiptoherijanto 2000). Dalam lingkup yang lebih luas, yaitu berbagai negara di Asia Pasifik, perpindahan penduduk dari desa ke kota lebih disebabkan karena kegiatan ekonomi negara-negara tersebut terpusat pada sektor industri dan jasa di daerah perkotaan (Ginanjari 2008). Pemusatan pembangunan di daerah perkotaan tidak hanya ditemukan pada aktifitas ekonomi, melainkan juga di sektor infrastruktur serta sarana dan fasilitas sosial. Yudhohusodo (1998) mengemukakan bahwa lambatnya pembangunan di daerah-daerah di luar Jawa, seperti di pedalaman Kalimantan, terjadi karena pertimbangan bahwa tidak efisien menyediakan berbagai infrastruktur serta sarana dan fasilitas sosial bagi daerah-daerah yang jarang penduduknya.

Di samping faktor ekonomi, beberapa faktor lain juga berperan sebagai penyebab terjadinya mobilitas penduduk desa ke wilayah perkotaan. Ketersediaan sarana dan fasilitas sosial yang lebih berkualitas dibanding dengan yang terdapat di perdesaan adalah salah satu di antaranya. Contoh, penduduk desa yang kaya akan mengirimkan anak-anaknya ke kota untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi (Skeldon 1997). Hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 2000 mendukung pendapat Skeldon tersebut, yaitu proporsi tertinggi (23,75 persen) penduduk usia

pendidikan menengah dan tinggi (15 -24 tahun) di perdesaan pindah ke kota karena alasan ingin melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, penduduk usia muda yang pindah ke kota dengan tujuan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi menjadi salah satu kelompok penyumbang pertumbuhan penduduk kota.

Banyaknya penduduk usia muda yang bermigrasi ke perkotaan dengan tujuan untuk melanjutkan pendidikan memunculkan permasalahan bagi pemerintah kota. Selama menempuh pendidikan, migran pada kelompok ini membutuhkan tempat tinggal yang sesuai dengan karakteristik mereka, misalnya di lokasi yang dekat dengan pusat-pusat pendidikan. Jenis tempat tinggal atau hunian yang dibutuhkan oleh kelompok ini berbeda dengan yang dibutuhkan oleh rumah tangga/keluarga biasa.

Terlepas dari persoalan yang timbul akibat mobilitas penduduk ke daerah perkotaan, misalnya pengadaan perumahan untuk menampung penduduk dalam jumlah besar, mobilitas penduduk dari desa ke kota memberikan manfaat ekonomi bagi para pelakunya. Para pelaku mobilitas merasakan “kemudahan” mencari nafkah di kota dibanding di desa, meskipun harus dibayar dengan berbagai pengorbanan, seperti tinggal di hunian murah dan tidak layak. Hal ini mereka lakukan agar dapat mengirim uang dalam jumlah besar bagi keluarga yang ditinggalkan di kampung. Mereka yang melakukan migrasi bersama anggota keluarga juga cenderung melakukan hal yang sama, yaitu memilih hunian yang murah untuk menghemat pengeluaran.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa migrasi dari desa ke kota merupakan salah satu strategi bagi individu dan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemiskinan di perdesaan akan berkurang karena adanya uang kiriman (remitansi) dari kota (UNFPA 2007a). Tidak jarang uang hasil bekerja anggota keluarga yang pindah ke kota dimanfaatkan untuk investasi di daerah asal, seperti membeli lahan pertanian. Pemilikan lahan pertanian dalam jangka panjang dapat mengeluarkan keluarga dari kondisi kemiskinan.

Manfaat ekonomi dari besarnya arus migrasi dari desa ke kota dirasakan pula dalam lingkup yang lebih luas, misalnya bagi kota secara umum. Kegiatan ekonomi di sektor informal seperti perdagangan makanan menjadi berkembang. Keberadaan pedagang makanan tersebut memberi manfaat pula bagi penduduk kota, yaitu pekerja di sektor formal dan

informal yang berpenghasilan rendah dan tidak mampu membeli makanan di restoran-restoran besar yang harganya mahal.

Siapa yang Melakukan Migrasi Desa – Kota?

Pelaku migrasi dari desa ke kota pada umumnya adalah penduduk dalam kelompok umur produktif. Sebagian besar dari mereka mempunyai pendidikan dan keterampilan rendah, termasuk kelompok miskin yang tidak mempunyai lahan pertanian dan bekerja sebagai buruh tani atau petani penggarap, serta petani yang mempunyai lahan sempit. Penelitian Puslit Kependudukan-LIPI di beberapa daerah permukiman kumuh (*slums*) dan permukiman spontan (*squatters*) di Kota Surabaya menemukan bahwa lebih dari dua per tiga responden yang merupakan migran dari desa ke kota termasuk dalam kelompok umur produktif dan berpendidikan rendah (tamat SD, tidak tamat SD, atau tidak sekolah) (Romdiati dkk. 2007). Kondisi ini merupakan fenomena yang juga ditemui di berbagai kota. Suharso, dkk (1976) dalam studi mereka menemukan bahwa sekitar 48 persen migran dari desa ke kota di DKI Jakarta berpendidikan rendah (lulus SD, tidak lulus SD, dan atau tidak sekolah sama sekali).

Hasil penelitian di atas berbeda dengan teori selektivitas migrasi yang mengatakan bahwa migran mempunyai pendidikan tinggi, sanggup membiayai perjalanan mereka, dan mampu mendapatkan tempat tinggal di tempat tujuan (Skeldon 1997). Keterbatasan kesempatan kerja di perdesaan telah memaksa sebagian penduduk usia kerja untuk meninggalkan daerah asal, meskipun tanpa dukungan pendidikan dan hanya sanggup membiayai perjalanan ke kota tanpa kemampuan untuk memiliki tempat tinggal sendiri, misalnya dengan menyewa. Namun, teori selektivitas migrasi yang mengatakan bahwa kecenderungan melakukan migrasi pada penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan terbukti dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 53,7 persen migran yang menjadi responden adalah laki-laki, sedangkan migran perempuan sebesar 46,3 persen.

Pola mobilitas penduduk ke daerah perkotaan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu mobilitas temporer dan permanen. Mobilitas temporer antara lain mencakup perpindahan yang dilakukan oleh penduduk desa menurut musim-musim tertentu, misalnya saat menunggu masa panen setelah musim tanam. Selama waktu tersebut, penduduk perdesaan

melakukan strategi untuk memperoleh penghasilan dengan menetap sementara waktu di kota sambil melakukan berbagai jenis aktivitas/pekerjaan. Oleh karena itu, pelaku migrasi temporer pada umumnya adalah petani yang menganggur di desa selama menunggu masa panen. Mobilitas permanen dilakukan oleh mereka yang berniat merubah tempat tinggal dan menetap di kota tujuan. Batas waktu yang digunakan untuk menentukan perpindahan permanen adalah 6 bulan.

Perbedaan pola mobilitas penduduk berdampak pada perbedaan karakteristik migran. Migran temporer, khususnya penduduk musiman, pada umumnya pindah ke kota sendiri tanpa membawa keluarga. Keluarga mereka ditinggalkan di daerah asal mengingat tujuan utama ke kota adalah untuk mencari penghasilan. Kelompok ini terdiri dari mereka yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Dari sisi pekerjaan, migran temporer pada umumnya bekerja di sektor informal karena sektor ini lebih mudah dimasuki mereka yang berpendidikan rendah. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan antara lain adalah berdagang makanan kecil, pemulung, pengendara ojek, dan tukang becak. Namun, sebagian di antaranya ada juga yang bekerja di sektor formal seperti buruh pabrik yang banyak terdapat di daerah perkotaan.

Penyediaan Perumahan dan Permukiman Bagi Penduduk Perkotaan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, salah satu masalah yang ditimbulkan akibat pertumbuhan penduduk kota yang tinggi adalah meningkatnya kebutuhan atas tempat tinggal beserta sarana dan prasarana pendukungnya seperti air bersih dan sarana perkotaan lainnya. Hal ini memaksa pemerintah kota untuk menyediakan semua fasilitas dan sarana tersebut agar kebutuhan penduduk yang tinggal di dalamnya dapat terpenuhi. Dalam banyak kasus pemerintah melakukannya dengan mengundang keterlibatan pihak lain, terutama pihak swasta untuk menyediakan sarana dan fasilitas tersebut.

Penyediaan perumahan dan permukiman secara umum mengacu kepada UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman. Pada Bab 1 Pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Perumahan didefinisikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat

tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi sarana dan prasarana. Selanjutnya, permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian atau tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman harus disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang aman dan layak agar dapat menciptakan kehidupan yang sehat dan nyaman bagi penghuninya.

Di daerah perkotaan, secara garis besar perumahan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: (i) perumahan yang direncanakan dengan baik dan dibangun dengan baik, teratur, rapi, serta dilengkapi dengan prasarana, utilitas, dan fasilitas yang baik, (ii) perumahan yang berkembang tanpa direncanakan sebelumnya, sehingga polanya tidak teratur dan tidak dilengkapi dengan prasarana serta utilitas dan fasilitas permukiman yang memenuhi syarat, dan (iii) perumahan yang tidak sepenuhnya direncanakan dengan baik. Dalam kelompok terakhir ini, selain rumah-rumah yang dibangun dengan teratur, di belakang atau di tengah perumahan terdapat pula rumah-rumah yang tidak teratur (Yudohusodo dan Salam 1991).

Menurut Wegelin (1994), berdasar survei yang dilakukan di beberapa kota besar, kota medium, dan kota sedang di Indonesia, antara lain Jakarta, Bandung, Lampung, Balikpapan, Jambi, dan Kupang mengemukakan bahwa ada dua sistem penyediaan rumah di daerah perkotaan Indonesia, yaitu *popular or household-based system* dan *formal system*. Sistem pertama adalah penyediaan rumah-rumah melalui pembangunan yang meningkat dan sangat responsif terhadap permintaan konsumen. Selanjutnya, sistem yang kedua adalah penyediaan rumah bagi penduduk dengan pendapatan sedang dan tinggi, yang memperoleh subsidi dalam jumlah besar. Beberapa pihak berperan dalam penyediaan rumah melalui sistem formal ini, yaitu PERUMNAS dan pihak swasta seperti pengembang kompleks perumahan.

Jika dicermati secara mendalam, rumah-rumah yang disediakan oleh pemilik modal (baca: pengembang perumahan – *developer*) maupun pemerintah melalui PERUMNAS hanya dapat diakses oleh mereka yang berpenghasilan tinggi dan juga berpenghasilan tetap. Rumah-rumah yang dibangun oleh perusahaan pengembang swasta dan PERUMNAS

memang bisa diperoleh melalui sistem kredit, namun hanya mereka yang berpenghasilan tetap yang dapat memperoleh fasilitas tersebut. Hal ini karena sistem kredit mensyaratkan penghasilan tetap bagi calon pembeli rumah. Akibatnya, kelompok miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, termasuk migran dari desa ke kota tidak bisa memiliki akses terhadap perumahan yang disediakan oleh pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, kelompok penduduk miskin yang tidak memiliki penghasilan tetap, termasuk pelaku migrasi dari desa ke kota yang berusaha untuk menekan pengeluaran selama hidup di kota, mencari jalan keluar dengan membangun hunian/tempat tinggal sendiri. Pada umumnya, daerah-daerah yang peruntukannya bukan untuk permukiman, seperti bantaran sungai, sepanjang jalan/rel kereta api, dan di sekitar pasar serta stasiun kereta api dijadikan lokasi hunian/tempat tinggal bagi kelompok penduduk tersebut (Yudohusoso dan Salam 1991). Jenis hunian yang dibangun bervariasi, mulai dari tempat tinggal yang sangat sederhana, berupa gubuk dari bahan-bahan yang tidak tahan lama, sampai dengan rumah permanen. Pembangunan hunian/tempat tinggal dengan jenis tersebut menyebabkan terbentuknya permukiman kumuh.

Kenyataan ini merupakan fenomena universal yang juga terjadi di berbagai kota di negara-negara berkembang. Lebih dari 90 persen penghuni permukiman liar dan kumuh saat ini berada di negara berkembang. Kotter (2004) dalam makalahnya yang dapat dibaca di internet menyatakan bahwa sekitar 1,5 milyar penduduk perkotaan tinggal di permukiman kumuh dan liar. Jutaan orang di kota-kota di berbagai negara berkembang tinggal di permukiman yang berisiko tinggi seperti di daerah perbukitan yang curam, di pinggir sungai yang rentan terhadap ancaman banjir, di daerah-daerah yang rentan dari sisi ekosistem, daerah tangkapan air, dan di lokasi-lokasi dekat areal industri yang berbahaya (UNFPA 2007a). Daerah-daerah permukiman tersebut mempunyai ciri-ciri padat, kumuh, dan tidak mengikuti aturan-aturan resmi. Selanjutnya, daerah-daerah permukiman dengan karakteristik itu juga diliputi oleh berbagai keterbatasan sarana dan prasarana permukiman seperti tempat pembuangan sampah, pengolahan air limbah, fasilitas sanitasi, dan drainase (Kotter 2004). Mereka yang tinggal di pinggiran sungai, pada umumnya menjadikan sungai sebagai sarana pendukung kehidupan seperti tempat pembuangan sampah

dan tidak jarang pula sebagai tempat mandi. Menurut perkiraan BPS, pada tahun 2006 sekitar 14 persen dari total perumahan di Indonesia merupakan kawasan perumahan kumuh di perkotaan (<http://www.bainfokomsumut.go.id/detail.php?id-1342>). Data yang akurat mengenai jumlah migran yang tinggal di permukiman ini sulit didapatkan karena mobilitas mereka yang tinggi. Namun, pada tahun 2006 diperkirakan sekitar 18 persen dari total penduduk Indonesia tinggal di permukiman kumuh perkotaan.

Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI mengenai perpindahan penduduk dari desa ke kota di Surabaya menemukan bahwa sebagian migran tinggal di permukiman liar dan kumuh seperti di bantaran kali, di pinggir rel kereta, dan juga di berbagai areal bukan permukiman lain, termasuk tempat pemakaman. Khusus di kawasan bantaran kali dan di pinggir rel kereta api, satu hal yang terlihat kontradiktif adalah rumah-rumah yang dibangun juga memperoleh fasilitas seperti yang didapat oleh rumah-rumah di permukiman penduduk pada umumnya. Rumah-rumah di kawasan tersebut mendapatkan aliran listrik, pelayanan air minum melalui PDAM, dan saluran telepon (Romdiati dkk. 2007). Selain itu, penghuni rumah juga membayar kewajiban seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk di permukiman biasa. Dalam kasus ini terlihat ketidakkonsistenan pemerintah (daerah) dalam memperlakukan permukiman kumuh. Di satu sisi keberadaannya dilarang, namun di sisi lain diberi fasilitas untuk mendukung kehidupan dan penghuninya juga dikenai kewajiban lazimnya penghuni permukiman pada umumnya.

Salah satu upaya untuk menyediakan tempat tinggal bagi penduduk miskin perkotaan, yang sebagian di antaranya adalah migran dari desa ke kota, adalah pembangunan rumah susun sederhana. Pemerintah kota Jakarta mulai melakukan upaya tersebut sejak awal tahun 1980-an (Palupi 2007). Jenis permukiman ini dibangun di areal-areal yang sebelumnya merupakan permukiman kumuh atau lahan milik negara yang tidak dimanfaatkan. Namun, pada kenyataannya rumah susun yang dibangun sering tidak dapat diakses oleh penduduk miskin yang menjadi sasarannya. Misalnya di kecamatan Tambora dan Karanganyar, lebih dari 90 persen penghuni rumah susun sederhana adalah mereka yang dari sisi penghasilan termasuk golongan menengah ke atas (Palupi

2007). Meskipun tujuan awal adalah untuk menyediakan tempat tinggal bagi penduduk miskin, karena pembangunannya melibatkan pihak-pihak yang berorientasi komersil, maka pengadaan rumah susun ini kemudian berubah menjadi kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Akibatnya, untuk menempati rumah susun dibutuhkan sejumlah dana yang sulit disediakan oleh penduduk miskin. Oleh karena itu, sebagian pihak memandang upaya pembangunan rumah susun bagi penduduk miskin perkotaan secara skeptis karena dalam kenyataannya kegiatan tersebut tidak menjangkau sebagian besar penduduk yang menjadi kelompok target.

Pemerintah kota Surabaya juga telah melakukan upaya pembangunan rumah susun sederhana untuk mengakomodasi penduduk yang tinggal di permukiman kumuh dan liar, yang sebagian di antaranya adalah penduduk migran dari desa ke kota. Namun, upaya ini tidak berhasil menghilangkan kantong-kantong permukiman kumuh, antara lain karena persyaratan administratif yang tidak dapat dipenuhi oleh kelompok target. Salah satu ketentuan yang ditetapkan adalah kepemilikan KTP Kota Surabaya atau KIPEM (kartu penduduk musiman) untuk mendapatkan tempat tinggal di rumah susun. Dalam kenyataannya, hampir tidak ada migran desa – kota yang mempunyai KTP Surabaya dan juga penduduk musiman yang memiliki KIPEM. Akibatnya, mereka tetap tinggal di permukiman kumuh dan liar. Alasan lain yang menyebabkan keberadaan permukiman kumuh tetap bertahan adalah kedekatan lokasinya dengan pusat-pusat aktifitas ekonomi, seperti pabrik dan pasar. Hal ini memudahkan migran dalam melaksanakan kegiatan usaha mereka.

PENUTUP

Urbanisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari di berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya negara-negara maju yang telah menjalaninya sejak pertengahan abad ke-19, negara-negara berkembang juga tengah menghadapi proses urbanisasi. Bahkan abad ke-21 ini dikatakan sebagai era kota dan urbanisasi. Fenomena urbanisasi berdampak positif dan sekaligus negatif bagi wilayah perkotaan. Dari sisi positif, keberadaan penduduk dalam jumlah besar di wilayah perkotaan merupakan pendukung terhadap perkembangan aktifitas ekonomi perkotaan. Sebagaimana telah dikemukakan

sebelumnya, pusat-pusat ekonomi akan berkembang di lingkungan dengan jumlah penduduk yang besar. Namun sebaliknya, pertumbuhan penduduk kota yang tidak terkendali menimbulkan berbagai persoalan bagi wilayah tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan kota berdampak negatif terhadap lingkungan, termasuk penurunan daya dukungnya untuk menciptakan kehidupan penduduk kota yang nyaman dan memenuhi syarat kesehatan. Penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan dasar seperti perumahan dan permukiman serta sarana dan prasarana pendukungnya, di samping dampak sosial lain, di antaranya kasus kriminal yang makin meningkat merupakan dampak negatif dari pertumbuhan penduduk kota yang tidak terkendali.

Pertumbuhan penduduk kota terjadi akibat beberapa faktor, yaitu pertumbuhan penduduk perkotaan secara alami (selisih kelahiran dan kematian), migrasi penduduk dari desa ke kota, dan perubahan klasifikasi wilayah perkotaan. Di negara-negara berkembang, migrasi penduduk dari desa ke kota memainkan peranan penting dalam meningkatkan proporsi penduduk kota yang besar. Melarang penduduk (termasuk yang dari perdesaan) untuk datang ke suatu kota merupakan upaya yang tidak mungkin dilakukan. Hal ini terbukti dari tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan kota tertutup oleh pemerintah Kota Jakarta pada tahun 1970-an. Salah satu faktor utama yang menyebabkannya adalah anggapan bahwa melarang kedatangan seseorang ke suatu tempat merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia. Namun demikian, upaya pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa cara.

Peningkatan pertumbuhan penduduk kota, khususnya kota besar, dapat ditekan antara lain dengan mengembangkan kota-kota kecil di sekitarnya melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini memungkinkan pengalihan arus migrasi masuk menuju kota besar ke kota-kota kecil yang berdekatan. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi migrasi penduduk ke kota besar adalah penyediaan sarana transportasi yang terjangkau namun nyaman, yang menghubungkan kota-kota kecil dengan kota besar yang berperan sebagai pusat ekonomi. Ketersediaan transportasi memungkinkan migran untuk tinggal di kota kecil, sementara aktifitas ekonomi dilakukan di kota besar.

Pembangunan daerah perdesaan, termasuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi perkotaan di daerah tersebut, dapat pula berperan untuk mencegah aliran mobilitas penduduk desa ke perkotaan. Kebijakan

ekonomi yang merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi seperti di perkotaan perlu dibuat dan diaplikasikan di daerah-daerah perdesaan. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kota melalui investasi untuk menciptakan kesempatan kerja di daerah perdesaan.

Apabila pertumbuhan penduduk kota yang pesat, terutama akibat besarnya arus migrasi ke kota, tidak dapat dikendalikan, maka berbagai persoalan yang terkait dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapi oleh pemerintah kota. Salah satu di antaranya adalah penyediaan tempat tinggal. Untuk menyediakan tempat tinggal bagi penduduk dalam jumlah yang besar, pemerintah daerah (kota) perlu memfasilitasi pengadaan perumahan bagi semua kelompok penduduk. Tidak hanya mereka yang berpenghasilan tinggi dan mampu membeli rumah dengan harga relatif mahal, penduduk berpenghasilan rendah pun harus memperoleh tempat tinggal yang layak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pengadaan rumah dengan harga yang terjangkau disertai dengan persyaratan-persyaratan yang dapat dipenuhi oleh penduduk berpenghasilan rendah. Untuk itu, pendataan kelompok target perlu dilakukan ke kantong-kantong permukiman kumuh dan liar. Dalam pendataan juga perlu dikumpulkan informasi mengenai aktifitas ekonomi kelompok sasaran, sehingga pembangunannya dapat disesuaikan dengan karakteristik kegiatan ekonomi mereka. Berdasarkan kegiatan ini perkiraan jumlah unit serta karakteristik hunian yang akan dibangun bisa diperoleh.

Pertumbuhan penduduk kota yang cepat, tidak terelakkan lagi menimbulkan berbagai persoalan yang adakalanya tidak mudah untuk diatasi. Dibutuhkan kemauan dan kerja keras masing-masing stakeholders untuk menangani berbagai permasalahan yang ditimbulkannya, termasuk penyediaan perumahan dan permukiman. Khusus untuk permukiman kumuh liar, satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah kemauan para penghuninya, yang kebanyakan adalah migran yang masih sering pulang ke daerah asal, untuk terlibat dalam kegiatan “pemindahan” mereka ke lokasi permukiman formal.

PUSTAKA ACUAN

Buku dan Jurnal

- BPS, Bappenas, UNFPA. 2005. *Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesian Population Projection) 2000-2025*. Jakarta: BPS, Bappenas, UNFPA
- Brookfield, Harold & Byron, Yvonne. 1993. *South-East Asia's Environmental Future. The Search for Sustainability*. Tokyo: United Nations University Press.
- Gilbert, Alan. 1994. "Land and shelter in mega-cities: Some critical issues" dalam Roland J. Fuch, dkk. (editor). *Mega-City Growth and the Future*. Japan: The United Nations University Press.
- Gilbert, Alan & Giggler, Josef. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogya: PT Tiara Wacana.
- Palupi, Sri. 2007. "Proyek Rumah Susun: Modus Mengusir Orang Miskin?" dalam Sri Palupi dan Iswantini. *Mendengarkan Kota. Studi Perbandingan Kota dan Komunitas Miskin Antara Jakarta – Bangkok*. Jakarta: Institute for Ecosoc Rights.
- Raharto, Aswatini dan Noveria, Mita. 2005 "Youth migration and change in Indonesia" dalam Fay Gale dan Stephanie Fahey (editor). *Youth in Transition. The Challenges of Generational Change in Asia*. Proceedings of the 15th Biennial General Conference Association of Asian Social Science research Councils. Bangkok: Regional Unit for Social and Human Sciences in Asia and the Pacific (RUSHSAP).
- Romdiati, Haning, Mita Noveria, Ade Latifa dan Bayu Setiawan. 2007. *Mobilitas Penduduk Temporer di Permukiman Kumuh Kota Surabaya. Pengelolaan dan Konteksnya Terhadap Penataan Lingkungan*. Jakarta: LIPI Press.
- Skeldon, Ronald. 1997. "Rural-to-Urban Migration and Its Implication for Poverty Alleviation". *Asia Pacific Population Journal*, Vol. 12, No. 1, March 1997.
- Suharso, dkk. 1976. "Rural – Urban Migration in Indonesia". *Monograph Series*. National Institute of Economic and Social Research, Indonesian Institute of Sciences.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1996. "Urbanization and Development in Indonesia". Asian Urban Information Center of Kobe. Kobe: Newsletter No. 23.
- UNFPA. 2007a. *State of World Population 2007. Unleashing the Potential of Urban Growth*. New York: United Nations Population Fund.
- . 2007b. *Growing up Urban. State of World Population 2007. Youth Supplement*. New York: United Nations Population Fund
- Wegelin, Emiel A. 1994. "Urban Shelter, Municipal Services, and the Poor" dalam Ernesto M. Pernia (editor). *Urban Poverty in Asia. A Survey of Critical Issues*. Hong Kong: Oxford University Press.

- Wilson, Christopher. 1985. *The Dictionary of Demography*. Paris: Roland Pressat.
- Yudohusodo, Siswono dan Salam, Soearli (editor). 1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
- Yudhohusodo, Siswono. 1998. *Transmigrasi. Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen Dengan Persebaran yang Timpang*. Jakarta: PT Jurnalindo Aksara Grafika.

Website

- Darundono, 2006. *Mencari model pembangunan perumahan yang berkelanjutan*. http://www.karbonjournal.org/id/archievesdetail.php?ID_focus=3.
- GINANJAR, GING. 2008. *Dari jantung Eropa. Urbanisasi Melaju, Juga Kemiskinan*. <http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3220834,00.html>. diakses 19 Februari 2009.
- HENDRIZAL. 2004. *Problem Arus Migrasi*. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0411/25/opi02.html>. diakses 19 Februari 2009.
- <http://www.bainfokomsumut.go.id/detail.php?id=1342>). *Sekitar 18 Persen Penduduk Indonesia Tinggal di Kawasan Kumuh Perkotaan*. diakses tanggal 18 Februari 2009.
- <http://www.datastatistik-indonesia.com/proyeksi/index.php?option...> Urbanization. diakses 19 Februari 2009.
- http://www.globalchange.umich.edu/globalchange2/current/lectures/urban_gc/. *Global Urban Population in Developed and Developing Countries*. diakses 20 Februari 2009.
- <http://www.hitachi.com/society/global/hyli/6th/workshop/pdf/urbanization/pdf>. *Managing Asia's Rapid Urbanisation for Social Progress*. diakses 20 Februari 2009.
- KOTTER, THEO. 2004. *Risks and Opportunities of Urbanisation and Megacities*. Paper dipresentasikan pada FIG Working Week, Athena, Yunani, 22 – 27 Mei 2004. http://www.fig.week.net/pub/athens/papers/psO2/psO2_2_kotter.pdf. diakses 5 Januari 2011.
- MAMAS, S.G. *Proyeksi Penduduk Kota-kota di Indonesia Periode 1995-2005*. <http://www.geocities.com/nuds2/18.html?200919>. diakses 18 Februari 2009.
- TJIPTOHERIJANTO, PRIJONO. 2000. *Urbanisasi dan Perkembangan Perkotaan di Indonesia*. <http://www.geocities.com/nuds2/18.html?200919>. diakses 19 Februari 2009.